

## KOMODIFIKASIAN OJEK PANGKALAN DALAM ARENA DEMOKRASI LOKAL

(Studi Kasus di Pemilihan Walikota Sorong Tahun 2017)

<sup>1</sup>Bustamin Wahid,<sup>2</sup>Ari Purnomo

<sup>1,2</sup>Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Sorong

### ABSTRACT

*This research is entitled: Commodification of Base Ojek Services in the Arena of Democracy (Case Study of Sorong City Election in 2017). Researchers try to review local political phenomena in Sorong West Papua by utilizing social solidarity ojek base in the interests of political power. Because ojek services are not just public transportation services but now base motorcycle taxi services are now a new social strength and capital that can be commercialized in political interests. In this study, the researchers formulated two questions: (1) How was the involvement of base taxi drivers in the elections in the city of Sorong in 2017? (2) What is the impact of modification of base taxi in the elections in Sorong city in 2017? With the existing research focus, the researchers used modification theory, political theory, social solidarity and knowledge of ojek services as theoretical legitimacy to direct and analyze this research so that it could provide adequate outcomes. This study uses a qualitative approach and descriptive method, with the aim of describing existing phenomena, which occur at this time or in the past. This study does not carry out manipulation or alteration of independent variables but tries to describe in accordance with the real reality, about content and research focus. Of course with great hope that this research can provide scientific and beneficial effects for many people and become an evaluation material for party institutions (political parties) in providing political education to the public. Especially for people who move as ojek (motorcycle taxi) bases. The output of this study can also add to the discourse and study of local politics which is increasingly complex to the social foundations of society.*

**Keywords:** *Commodification, Ojek, and Local Democracy*

### PENDAHULUAN

Sorong menjadi Kota transit di tanah Papua, gemar manusia dari berbagai penjuru daerah berdatangan di tanah Papua, siklus meningkat daerah Sorong menjadi tempat yang untuk migran (pendatang) dan menetap hidup untuk mencari suaka rejeki. Kota urban yang ditempati banyak pendatang baik itu Jawa,

Bugis-Makasar, Buton, Ternate, Tidore, Halmahera, Manado, Tanimbar, Seram, Key, Ambon, NTT, NTB, Batak, dan bahkan seluruh suku yang ada di nusantara ada di Kota Sorong.

Ojek menjadi pekerjaan alternatif untuk waktu senggang para pendatang dan orang asli Papua. Tetapi mayoritas jasa ojek di Sorong Papua Barat adalah orang-orang

pendatang yang bekerja sebagai pekerjaan alternatif. Tidak main-main jasa ojek memiliki peran besar sebagai penyelamat kesenjangan ekonomi, menyelamatkan cita-cita pendidikan anak dan terlebih lagi memperjuangkan anak untuk menyelesaikan pendidikan perguruan tinggi.

Di Sorong Papua Barat jasa ojek gemar di gunakan, tetapi tak sedikit sontak kata-kata miring untuk para tukang ojek yang nakal (asusila). Perjuangan para ojek untuk mendapatkan pangakuan dan kepercayaan publik bukan hal yang mudah sebagai tukang ojek. Jasa ojek di Sorong Papua Barat, ada beberapa ojek dengan dasar kepercayaan karena konsistensi dan tanggungjawab, mereka (jasa ojek) dipakai sebagai langganan antara-jemput anak sekolah dan mereka disebut sebagai ojek langganan keluarga.

Pangkalan-pangkalan ojek tumbuh subur dan menjamur dimana-mana, dimana ada celah tempat publik yang ramai disitu pula akan berdiri pangkalan jasa ojek. Mereka sadar pelayanan prima dengan mendekatkan pelayanan terhadap para pelanggan jasa ojek kota Sorong, dengan penuh disiplin dan budaya antri yang panjang. Dalam kondisi untuk bergerak cepat untuk mencari pundi-pundi rejeki,

mereka harus membangun reputasi secara baik agar dipercayai oleh masyarakat.

Ada kerinduan dan kegelisahan untuk menjelaskan perjalanan peristiwa yang dipahami oleh kelompok ojek (transportasi umum/motor), tentu dalam penulisan ini tidak jauh menjelaskan secara mendalam tentang sosial-ekonomi tukang ojek itu sendiri tetapi lebih dari ojek dan politik pangkalan. Ojek menjadi bagian dari elemen yang berada pada pusat dinamisasi sosial yang terjadi, dinamisasi sosial ini menuntun manusia untuk selalu bertahan hidup, dan sekiranya alternatif yang produktif dan tidak memiliki administrasi panjang jasa ojek sebagai solusi alternatif dalam ruang kerja.

Jasa ojek selain membangun pangkalan-pangkalan ojek, mereka pula memiliki koordinator pangkalan, ternyata mereka mau berorganisasi dan terorganisasi menjadi solidaritas yang resmi dan terorganisir. Walau sejauh ini belum ada aturan yang mengikat mereka secara terpadu tetapi jasa ojek sangat digemari. Kepentingan tukang ojek pangkalan terakomodir dan mendapat perhatian khusus, ojek pangkalan menjadi kekuatan modal sosial baru karena dengan solidaritas, simpul-simpul sosial bisa

dilirik sebagai basis kekuatan untuk kepentingan politik kekuasaan.

Hasil riset Basri Amin menemukan kekuatan dan mobilisasi pengojek ini dimanfaatkan oleh elit lokal dalam mendongkrak popularitasnya sebagai seorang politisi. Pengakuan Rival Rahmi yang menyimpan memori salah satu caleg anggota DPRD dari partai Golkar dia menggunakan jasa ojek untuk menyebar stiker, kartu nama, spanduk selama pemilu legislatif 2009. (baca: Pemuda, ojek dan urban di Ternate). Selanjutnya ojek pangkalan di kota Sorong menjadi objek yang menarik sebagai basis kapitalisasi atau dalam bahasa penelitian ini sebagai komodifikasi jasa ojek dalam kepentingan politik praktis. Atau dalam pemikiran Karl Marx, kapitalisasi masyarakat kelas bawah biasa terjadi karena para elit penguasa ingin mendapatkan nilai kepentingan.

Hasil riset perilaku politik di Kota Sorong memberikan kita gambaran bahwa presentase keinginan politik uang (*money politic*) 78.12 persen (%), dan ini ada beberapa responden yang bekerja sebagai jasa ojek pangkalan (Laporan hasil riset The Papua Institute, Mei 2016). Di kota Sorong jasa ojek pangkalan menjadi tempat untuk jual beli kepentingan, baik itu

memberikan bentuk secara kolektif kepada tiap-tiap ojek pangkalan yang ada. Pengakuan salah satu ojek pangkalan kampus UM-Sorong bahwa menjelang pilkada kami ditawari untuk memilih salah satu kandidat dengan nilai tukar perorang Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah per orang) atau dalam istilahnya sebagai uang minyak jasa ojek pangkalan.

Jasa ojek pangkalan, sering digunakan sebagai tim kampanye kandidat dan para partai politik. Biasa kami digunakan untuk masa kampanye, jika tiba waktu kampanye kami tukang ojek biasa didatangi oleh anggota partai atau tim sukses, sebab tukang ojek pangkalan sering membuat ramai pada saat konvoi partai atau kandidat, jika ditilik dalam perspektif Ervin Goffman, maka jasa ojek pangkalan sebagai pelabelan masa politik. Biasa juga tukang ojek pangkalan dipakai untuk pemasangan baliho dan spanduk kandidat, justru tim sukses atau orang partai meminta pemasangan baliho dan spanduk dekat pangkalan ojek, karena itu sentral dan mudah dilihat oleh masyarakat. (Pengakuan Tukang Ojek “Insial MT”, Januari 2017).

Kekuatan dan modal sosial per-ojekan bisa dikomersilkan menjadi basis politik. Sebab dalam dunia politik juga

tidak terlepas dari dua kutub besar yaitu modal sosial dan modal finansial. Jasa ojek pangkalan dengan dasar solidaritas, terorganisir dan kompak tukang ojek pangkalan dilirik menjadi salah satu simpul sosial yang bisa dimanfaatkan sebagai basis politik. M. Foucault (Yudilatif, 2013), setiap subjek sosial memiliki relasi kuasa, dan subjek itu sendiri terlibat dalam permainan strategi untuk mendapat legitimasi dan pengakuan kuasanya. Konteksnya dijasa ojek pangkalan sama persis, sebab gabungan subjek sosial yang terorganisir memiliki pengaruh kuasa yang besar dan bisa memberikan pengaruh strategi kepada subjek sosial yang lain. Jadi di antara politisi dan ojek pangkalan sama-sama memainkan peran strategi untuk kepentingan.

Dari deskripsi singkat diatas, pemanfaatan jasa ojek dalam politik lokal saat ini, dan tukang ojek pangkalan memanfaatkan momentum politik dalam peningkatan pendapatan dan keuntungan dari bantuan partai atau kandidat. Jual beli kepentingan menjadi hal yang biasa dan sering terjadi dalam kehidupan sosial-politik. Peneliti merasa penting untuk meneliti sebuah fenomena ojek pangkalan dan politik dengan merumuskan judul penelitian tentang: *Komodifikasian Ojek*

*Pangkalan dalam Arena Demokrasi Lokal. (Studi Kasus di Pemilihan Walikota Sorong tahun 2017).*

## **KAJIAN PUSTAKA**

### ***1. Komodifikasian***

Menurut Yasraf Piliang (Zebrina, 2012: 16), komodifikasian (*comodification*) menurut adalah sebuah proses menjadikan sesuatu yang sebelumnya bukan komoditi sehingga kini menjadi komoditi. Sedangkan Barker mendefinisikan komodifikasi sebagai proses asosiasi terhadap kapitalisme, yaitu objek, kualitas dan tanda dijadikan sebagai komoditas. Komoditas adalah sesuatu yang tujuan utamanya adalah untuk dijual ke pasar.

Peneliti melihat bahwa komodifikasian dalam dunia politik bukan hal yang baru, tetapi terjadi semenjak lama. Kapitalisasi basis sosial baik itu kumunitas, organisasi, ketokohan dan bahkan kesaralan sekalipun menjadi akses dan perantara untuk menjual basis sosial ke kepentingan politik.

Dalam dunia demokrasi, celah dan permainan strategi untuk berada pada titik kemenangan adalah sebuah keharusan.

Dalam pandangan Kuntowidjoyo (2001:343), menyebutkan demistifikasi politik yang syarat dengan komodifikasian politik itu sendiri. Dan bahkan seperti PKB “partai politik” telah menggunakan empat hal yaitu: (a) penggunaan jasa jin; (b) upaya penyumpahan anggota legislatif; (c) pemanfaatan para kiai sebagai *political broker*, dan (d) kultur pribadi. Empat item tersebut dalam pendapat peneliti ada dua kutup yang bermain dalam kepentingan politik: pertama adalah tekanan mistisisme, dan. Kedua: menggunakan basis sosial sebagai kapitalisasi suara politik.

Dalam perspektif dialetika materialisme, Marx (Evans, 2004:16) katakan bahwa memberinya makna sebagai apapun yang diproduksi dan untuk diperjualbelikan. Tidak ada nilai guna murni yang dihasilkan, namun hanya nilai jual, diperjualbelikan bukan digunakan. Komodifikasi menggambarkan proses dimana sesuatu yang tidak memiliki nilai ekonomis diberi nilai dan karenanya bagaimana nilai pasar dapat menggantikan nilai-nilai sosial lainnya. Sebagai komoditas ia tidak hanya penting untuk berguna, tetapi juga berdaya jual.

Ulasan Adorno (Yasraf, 2010: 73), komodifikasian menjadi bagian dari produksi budaya masa. Tetapi ada dua hal, budaya dikendalikan kelompok elit dari atas (top down), dan beda budaya yang tumbuh dari bawa. Dalam konteks komodifikasian politik ini bisa menjadi rentetan pemanfaatan kelompok elit politik terhadap kelompok sosial (ojek pangkalan) sebagai basis politik.

Ada domain politik, terlebih menggunakan kajian ekonomi politik, bahwa basis sosial yang menjadi sasaran empuk untuk para pencari dan pemuja kepentingan dengan memanfaatkan solidaritas dan komunitas untuk “hasrat politik”. Sebuah kewajaran dan mungkin saja tetapi dengan syarat adalah kemanusiaan. Perkara kepentingan komodifikasian politik saat ini masi dengan kerangka menguntungkan dan memberikan nilai lebih dalam dunia politik adalah mengkomersilkan suara untuk kepentingan. Jadi kontennya yang dibahas dan dilacakan adalah ojek pangkalan dalam fenomena kapitalisasi politik.

## 2. *Ojek Pangkalan*

Jasa pangkalan adalah penyediaan jasa transportasi roda dua (motor) yang

melayani aktivitas masyarakat di mana masyarakat itu membutuhkan. Ojek pangkalan yang biasa dengan budaya antri dan menawarkan jasanya untuk dengan standar bayaran yang telah ditentukan oleh pemerintah dan para jasa pengojek. Solidaritas pengojek telah dirajuk bersama di dunia pangkalan.

Dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBI), ojek/ojeg adalah sepeda atau sepeda motor yang ditambangkan dengan cara memboncengkan penumpang atau penyewanya. Lebih lanjut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (1994), dalam kamus bahasa Indonesia sepeda motor yang dibuat menjadi kendaraan umum untuk memboncengi penumpang ke tempat tujuan. Peter Salim dan Yenny Salim (1991), ojek adalah sepeda atau sepeda motor dengan cara disewa untuk membonceng penyewanya.

Pengojek dan dunia politik bukan hal baru. Sheller & Urry (Basri Amin, 2012: 130), ada sejumlah faktor yang menjadikan ojek menarik bagi politisi lokal. Pengojek adalah kelompok besar yang sangat lincah bergerak, sebuah pencerminan dari gejala “mobilitas ganda” dimana pergerakan fisik dan komunikasi dilakukan setiap harinya.

### 3. *Demokrasi (pilkada)*

Ramlan Surbakti (1992:181) Pemilu diartikan sebagai mekanisme penyeleksi dan pendelegasian atau penyerahan kedaulatan kepada orang atau partai yang dipercayai, tetapi penulis menetapkan pengertian pemilu sebagaimana dicantumkan dalam Undang-Undang dan UUD 1945.

Fitriyah (2005:1) “pentingnya pilkada” secara langsung membuat semua daerah harus mempersiapkan diri mereka sebaik-baiknya dan berusaha bagaimana dapat berlangsung demokrasi dan berkualitas sehingga benar-benar mendapat kepalah daerah dan wakil kepalah daerah yang dapat membawa kemajuan bagi daerah sekaligus memberdayakan masyarakat daerahnya. Selain itu, salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada secara langsung juga dapat memberikan pendidikan politik bagi masyarakat di daerah, di mana nantinya mereka menjadi lebih berpengalaman dan ikut partisipasi dalam kegiatan politik.

Menurut Prihatmoko (2003:19) pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan yakni: (1) Sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (public

policy). (2) Pemilu sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin. (3) Pemilu sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.

Asas-Asas Pemilu Dalam pelaksanaan pemilihan umum asas-asas yang digunakan diantara sebagai berikut : (a) Langsung, berarti masyarakat sebagai pemilih memiliki hak untuk memilih secara langsung dalam pemilihan umum sesuai dengan keinginan diri sendiri tanpa ada perantara. (b) Umum, berarti pemilihan umum berlaku untuk seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan, tanpa membedakan agama, suku, ras, jenis kelamin, golongan, pekerjaan, kedaerahan, dan status sosial yang lain. (c) Bebas, berarti seluruh warga negara yang memenuhi persyaratan sebagai pemilih pada pemilihan umum, bebas menentukan siapa saja yang akan dicoblos untuk membawa aspirasinya tanpa ada tekanan dan paksaan dari siapa pun. (d) Rahasia, berarti dalam menentukan

pilihannya, pemilih dijamin kerahasiaan pilihannya. Pemilih memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak dapat diketahui oleh orang lain kepada siapa pun suaranya diberikan. (e) Jujur, berarti semua pihak yang terkait dengan pemilu harus bertindak dan juga bersikap jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (f) Adil, berarti dalam pelaksanaan pemilu, setiap pemilih dan peserta pemilihan umum mendapat perlakuan yang sama, serta bebas dari kecurangan pihak mana pun.

Pelaksanaan pemilu telah di atur dalam mekanisme peraturan kimis pemilihan umum Republik Indonesia No 3 tahun 2016 tentang tahapan, program dan jadwal pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2017. Dan undang-undang Republik Indonesia nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi undang-undang (sumber: salinan PKRI, UU Pemilu 2016).

#### **METODE PENELITIAN**

## 1. Model Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif. Instrumen kunci dalam penelitian adalah peneliti. Oleh karena itu, peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas sehingga dapat bertanya, menganalisa dan mengkonstruksikan objek yang diteliti menjadi jelas.

Karena penelitian ini bermaksud memperoleh gambaran yang mendalam tentang kemodifikasian ojek pangkalan dalam pemilihan walikota sorong tahun 2017. Di samping itu fenomena yang akan digali merupakan fenomena sosial-politik yang berhubungan dengan perilaku dan interaksi sosial-politik Kota Sorong Provinsi Papua Barat.

## 2. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

### 1. Teknik Pengumpulan Data

Untuk penelitian ini mengumpulkan data dengan menggunakan cara: Observasi, Wawancara, Teknik Dokumentasi.

### 2. Teknik Analisis Data.

Aktivitas analisis data yang dideskripsikan oleh Rossman dan Rallis (Johan W. Creswell, 2010: 274), bahwa

analisis data proses berkelanjutan yang membutuhkan refleksi terus-menerus terhadap data, mengajukan pertanyaan-pertanyaan analitis, dan menulis catatan singkat sepanjang penelitian. Maksud peneliti analisis data kualitatif bisa saja melibatkan proses pengumpulan data, menafsirkan data dan pelaporan hasil secara serentak dan bersama-sama.

## PEMBAHASAN

### *Keterlibatan Ojek Pangkalan Dalam Pilkada Di Kota Sorong*

Momentum politik adalah hajat semua rakyat. Keterlibat dalam pilkada atau pemilihan umum itu adalah hak rakyat Indonesia untuk menunaikan cita-cita demokrasi di negeri ini. Untuk Kota Sorong momentum pemilihan kepada daerah (pilkada) 2017 adalah pertarungan antara Lambert Jitmau dan Fahima Iskandar yang disekingkat (Jilid II) melawan kotak Kosong. Arena semakin menarik karena gerakan dan kampanye untuk memilih kotak kosong cukup massif di lakukan oleh kelompok masyarakat yang beda dalam pandangan politik. Hal itu terlihat juga oleh salah satu tukang ojek pangkalan, Bapak Acham katakana bahwa

dalam pemilihan kali ini kita tidak punya alternatif pemimpin yang siap kita perjuangkan. Dengan kondisi yang ada, maka kami akan perjuangkan kotak kosong di pilkada kota Sorong. Dari pernyataan ojek pangkalan tersebut adalah satu pernyataan konstitusional dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi.

Fenomena lain juga terjadi pada Ojek pangkalan dalam melihat momentum pilkada ini, hasil riset persepsi masyarakat terhadap sosial politik pada 28 Juni 2016 oleh The Papua Institute. Presentasi potensi politik transaksional (*money politic*) di kota Sorong cukup tinggi diangka 78.12 persen (%), itu terjadi dimasyarakat kelas menengah kebawah (Dokumen Laporan Survei The Papua Institute, 2016). Mngang ada politik transaksi terjadi (politik uang), tapi belum tentu kami memilih.

Menurut Steven (Kk Stev), bahwa yang berhubungan dengan politik transaksional memang betul adanya, tapi hal itu dilakukan karena ada uang bensin, ya lumayan “100.000-200.000” rupiah. Tapi sikap politik belum tentu, bahkan saya secara pribadi termasuk orang yang kompanyekan kotak kosong (kokos) untuk

melawan Bapak Walikota Lambert Jitmau karena persoalan banjir di kilo meter 10 yang tidak ada solusi . (Hasil Wawancara dengan Bapak Steven (Kk Stev) ojek pangkalan Jupiter).

Bapak Abas Joho katakana bahwa, jika di ajak kompanye kami ikut, tapai kami katakana bahwa ini Papua, semua serba mahal dan tim sukses melalui kordinator ojek pangkalan mereka memberikan uang celengan untuk kami pangkalan ojek. Dipangkalan kami, ditugaskan untum memasang dan menjaga baliho/spanduk Calon Walikota. Terlibat dalam politik itu terkadang aneh, dan sebenarnya itu adalah pelanggaran, sebab kami tukang ojek biasanya kami memilih (coblos) berulang-ulang kali karena ada mobilisasi, istilah kami disini adalah ojek suara. Hal itu biasa dikordinir oleh kordinator di pangkalan ojek (Hasil Wawancara dengan Bapak Abas Joho, Ojek Pangkalan Kilo 12 Masuk).

Perspektif yang dibangun dalam melihat momentum politik di kota Sorong, seakan-akan ada post-optimisme (fase pesimisme) karena kepentingan yang enggan dicapai oleh pengambil kebijakan.

Tanggapan dan partisipasi para ojek pangkalan bervariasi dan memiliki pandangannya masing-masing, mereka terlibat dalam proses demokrasi di kota Sorong baik dari kampanye sampai pada pemilihan, dari pandangan mereka tentang politik transaksional tidak menjamin dan memberikan satu kepastian bahwa kami memilih kandidat yang memberikan uang. Money politic sangat luar biasa terjadi dalam Pilkada. Masyarakat tidak mau berpartisipasi kalau tidak ada uang. Uang buakan menjadi segalanya, namun ada titik kejenuhan masyarakat pada model politik kita karena disebabkan oleh para pemimpin yang banyak tidak tepati dengan janjinya, dan hanya menguntungkan golongannya. Oleh karena mengambil uang kandidat bukan untuk memilih tetapi hanya ekspresi dari rasa kesal kepada janji-janji politik.

Tapi dari hasil observasi ternyata, peneliti menemukan pergeseran partisipasi mereka pada pilkada dan pemilihan legislative berbeda. Dari data yang dimiliki oleh peneliti, beberapa pangkalan ojek yang dijumpai oleh peneliti memberikan satu tanggapan bahwa pilkada kota Sorong adalah momentum politik yang tidak memberikan pilihan lain atau figur alternate, maka partisipasi pun rendah. Situasi politik berbeda lagi

dengan semangat pemilihan legislatif nanti, karena yang perjuangan adalah orang-orang yang dianggap layak secara ideologi dan perjuangan paguyuban.

Seorang pengojek dipangkalan HBM, justru menjelaskan bahwa betapa pentingnya harapan tentang politik yang lahir dari rasa kemanusiaan yang tinggi, karena dengan rasa kemanusiaan itu partisipasi dalam memilih pemimpin pun semakin baik, berikut kutipannya: “Kami ojek terlibat dan bicara tentang politik itu adalah soal rasa dan cinta. Kami menentukan seorang pemimpin politik lahir dari keusudahan masyarakat, karena dia tahu bagaimana cara menyelesaikannya, bukan sekejap datang lalu pergi. Kami merindukan sosok pemimpin yang tidak bicara perbedan agama, rasa, suku, kami ikut dia karena dia bicara masalah kemajuan. Memang kami ikuti kompanya jika diajak, tetapi belum tentu memilih, sebab kami walau pun ojek bisa kami membaca mana yang baik dan mana yang melupakan kami setelah jadi.” (Hasil Wawancara dengan Bapak Tiku Ojek Pangkalan HBM).

Cukup kompleks alasan partisipasi ojek pangkalan dalam pilkada Kota Sorong 2017. Miriam Budiarto secara umum mengartikan partisipasi politik sebagai

kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara/Daerah secara langsung atau tidak langsung memengaruhi kebijakan pemerintah (*public policy*). Sekaligus membagiakan jenis partisipasi politik dalam tiga bagian, (1) *gladiator* adalah mereka terlibat aktif dalam politik dengan jumlah yang sedikit namun memiliki pengaruh yang sangat besar. (2) *spectator* adalah masyarakat yang ikut menggunakan hak pilihnya, berpartisipasi dengan hanya ditunjukkan dengan memilih pada saat Pemilu. (2) *apatitis* yang tidak mau menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu. (Tia Subekti, 2014: 12)

Jika kita lihat dari temuan penelitian tersebut, maka pandangan dan kepentingan ojek pangkalan dalam politik itu banyak dan beragama. Tetapi mayoritas ojek pangkalan lebih tepat pada kelompok partisipasi *spectator* dan *apatitis*. Tetapi disisi lain kita lihat bahwa partisipasi masyarakat ada dua motif. Pertama, imbalan karena ada keuntungan atau pertukaran nilai materi. Kedua, partisipasi lahir dari kesadaran terutama terlibat langsung dalam memilih. Jadi makna partisipasi politik oleh ojek pangkalan ini sangat jauh berbeda seperti apa yang diulas

dalam ruang-ruang normatif dan pendapat para ahli. Dari pandangan partisipasi ojek pangkalan, ada memberkan satu fakat politik pemanfaatan kelompok sosial seperti ojek pangkalan sering terjadi.

### ***Dampak Komodifikasian Ojek***

#### ***Pangkalan Dalam Pilkada di Kota Sorong***

Ojek pangkalan adalah komunitas sosial yang bisa menjadi nilai tambah untuk kepentingan elite politik dalam momentum politik yang dikenal dengan pemilu dan pilkada. Ojek pangkalan adalah satu titik simpul sosial yang tingkat mobalnya tinggi dan relatif muda untuk diajak terlibat dalam kepentingan politik. Tapi tak disangka dari hasil observasi dan dokumen riset menunjukkan bahwa ojek pangkalan pun kini sudah memulai memiliki pandangan politik yang bisa menguntungkan untuk kepentingan komunitas dan individu.

Dari dokumen tersebut, selaras dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Marten di saat peneliti berjumpa di pangkalan ojek 35, dalam pengakuanya bahwa selama saya berpangkalan di sini, sering dalam momentum politik baik itu pemilihan legislatif dan pemilihan

Walikota Sorong, pasti ada yang datang untuk meminta dukungan. Hal itu bagi kami sesuatu hal yang wajar karena ini politik, mereka hadir untuk menyapa masyarakat tentu masyarakat harus membukan diri.

Mengukapa hal yang sama juga oleh Velix, bahwa: Dunia politik memanfaatkan basis sosial sebagai kekuatan politik untuk merebut kemenangan. Ojek pangkalan termasuk salah satu kelompok kini digemari untuk kepentingan politik kekuasaan para elite . (Hasil Wawancara dengan Bapak Velix Daman).

Selain dari pendapat di atas, Bapak Anton memberikan satu keterangan bahwa: “Kami ojek pangkalan sering dimanfaatkan dalam politik, misalnya diminta untuk kampanye atau agenda partai yang membutuakn banyak masa. Kami berfikir teranya ojek pangkalan kini sudah menjadi komoditi politik, tadinya tidak dianggap dan tidak bernilai. Kini malah dicari dan dibutuhkan. Bahkan setiap momentum politik ojek pangkalan menjadi salah satu basis masa rill yang siap dimobilisasi. Bayangkan saja dalam bebrapa pilkada serentak, kami bukan saja tim kampanye di pilkada kota Sorong tetapi mobilisasi hingga kampanye Kab. Sorong di Aimas.

(Hasil Wawancara Dengan Bapak Anton, Pangkalan Ojek 13 Moyo).

Jika dicermati, ojek pangkalan bagian dari pada klompok sosial yang terorganisir dan memiliki basis politik realitif banyak. Peran-perana kordinator ojek pangkalan menjadi sentral dan rujukan untuk kepentingan para elite politik. Di beberapa tempat kordinator ojek pangkalan cukup berperan sebagai titik simpul dalam kemenangan pilkada. Dan nilai tukar yang meraka miliki adalah transaksi (materi) diperunjukkan kepada komunitas ojek pangkalan, isyarat jual beli kepentingan akan terjadi dalam komunitas sosial. Kepentingan elite politik terlepas dari kekuatan finansialnya dia membutuhkan modal sosial yang kuta terlebih penjaringan komunitas itu sendiri. Peneliti melihat bahwa komodifikasian dalam dunia politik bukan hal yang baru, tetapi terjadi semenjak lama. Kapitalisasi basis sosial baik itu kumunitas, organisasi, ketokohan dan bahkan kesaralan sekalipun menjadi akses dan perantara untuk menjual basis sosial ke kepentingan politik.

Bergening politik yang dimainkan oleh ojek pangkalan memberkan posisi politik yang tinggi. Karena dalam dunia politik praktis, sebaik-baiknya jejaring adalah jejaring yang memiliki basis politik

yang banyak dan komitmen terhadap keputusan politik secara kolektif. Ojek pangkalan memiliki nilai tawar itu, yang dimaknai dalam riset ini sebagai komodifikasi kelompok sosial sebagai komoditi politik.

Kekuatan ojek ini bisa dikomersialisasi menjadi kekuatan politik dalam kepentingan politik praktis. Dan bahkan tukang ojek menjadi salah satu komunitas sosial, salah satu titik incaran yang alhasil bisa membangun kontrak politik. Dibeberapa daerah selain Papua, di Tidore menjadi referensi untuk mengungkap tentang politik ojek/politik pangkalan, setiap pangkalan ojek di Tidore senantiasa menyimbolkan dukungan kepada salah satu kepala daerah baik itu foto kandidat atau partai pengusung yang ada dipangkalan ojek masing-masing (dego-dego menggambarkan dukungan). Ada pengadan-pengadan fasilitas pangkalan yang pada umumnya terjadi seperti TV dan dana santunan kepada tukang ojek.

Hasil riset Basri Amin (2012) menemukan kekuatan dan mobilisasi pengojek ini dimanfaatkan oleh elit lokal dalam mendongkrak popularitasnya sebagai seorang politisi. Corak pemikiran pengojek ini kian berbeda secara personal,

walau secara organisatoris ada dukungan politik. Tetapi ada beberapa tukang ojek berfikir tentang bagaimana kualitas berpolitik kita ini harus baik dan berkualitas yang berefek kesejahteraan, namun ada pula kesadaran pesimisme menjamur dan menggunakan pragmatisme sebagai dalil untuk menghendaki politik transaksional atau mengiyakan politik uang.

Politik bisa masuk dalam sendi sosial mana saja, dimana ada ruang dan celah maka senada kepentingan politik berada pada ruang itu. Afiliasi dan sosialisasi partai politik ini menjadi hal yang wajar dan secara kelas sosial pun bisa diklasifikasi dalam analisis politik, cukup fasih dijelaskan oleh Gabriel Almond tentang pentingnya memahami budaya politik karena ini menyangkut sikap dan pemahaman warga Negara tertentu. Konsolidasi kekuatan politik yang paling menarik adalah berada pada komunitas-konistas sosial yang banyak. Nah dalam konten pilkada kota Sorong, ojek pangkalan menjadi menarik karena ojek adalah kelompok sosial yang menjadi sasaran dan serbuan kepentingan politik.

## **KESIMPULAN**

Penelitian yang dilakukan di Kota Sorong yang fokus pada ojek pangkalan dan pilkada di tahun 2017. Dalam riset ini memberikan beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Kertlibatan atau pertisipasi ojek pangkalan sama sepeti masyarakat pada umumnya sepeti para kader-kader partai. Tetapi ada makna partisipasi penuh dengan syarak transaksional pada momentum pilkada kota sorong 2017. Hal lainnya jika pemilihan legislatif karena yang mereka nilai dari seorang figur.
2. Makna partisipasi yang ditangkap dari ojek pangkalan, terus mengalami dinamisasi dan mengkompleks. Perana dari ojek pangkalan memberikan efek pada peningkatan jumlah suara dalam merebut kekuasaan.
3. Komodifikasian yang dilakukan oleh elite politik untuk kepentingan kuasa politiknya, dan bahkan ada kapitalisasi komunitas oleh aktor ojek pangkalan untuk kepentingan pribadinya.

#### DAFTAR PUSTAKA

Amin, Basri. 2012. *Youth, Ojeg and Urban Space In Ternate Town.*

(Pemuda, Ojek dan Ruang Urban di Ternate). Jurnal: *the Asia Pasifik of Anthropology.*

- A. Ways, Muliastyah. 2015. *Political, Ilmu Politik, Demokrasi, Partai Politik, & Welfare State.* Yogyakarta: Litera.
- Ardianto, Elvinaro, 2011. *Metodologi Penelitian Untuk Publik Relations Kualitatif& Kuantitatif.* Bandung: Simbiosis.
- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian.* Jakarta: Rineka Ilmu
- Evans. 2004. *Das Kapital untuk Pemula.* Yogyakarta: Resist Book.
- Hafel, Muhlis. 2004. *Respon Terhadap Tuntutan Regulasi Ojek: Studi Kasus Di Kota Ternate.* (tesis). Universitas Gaja Mada Yogyakarta.
- Hubermens, dan Miles. 2014. *Analisis Data Kualitatif* Bukusumber tentang metode-Metode Baru. Jakarta: UI Pres.
- John. 2010. *Research Desigen "Pendekatan Kualitatif, Kuantitatid Dan Mixed".*
- Katz , Richard S. dan Crotty, Wiliam . 2015. *Hanbook partai politik.* Bandung: Mizan.
- Nasir, Moh. (2011). *Metode Penelitian.* Bogor: Ghalia Indonesia Nusamedia.
- Piliang, Yasraf Amir. 2010. *Bayang-bayang tuhan agama dan imajinasi.* Bandung:
- Pradjnaparamita, Zebrina. 2012. *Komodifikasi tas belanja bermerek: Motivasi dan Identitas Kaum Shopaholic Golongan Sosial Menengah Surabaya.* (Tesis). Program Magister Kajian Sastra dan

Budaya, Fakultas Ilmu Budaya,  
Universitas Airlangga.

Prihatmoko. 2003. Mendemokrasi-  
kan Pemilu, Dari Sistem Sampai  
Elemen teknis.

Subekti, Tia. (2014). Partisipasi Politik  
Masyarakat Dalam Pemilihan  
Umum (Studi Turn Of Voter  
Dalam Pemilihan Umum  
Kepala Daerah Kabupaten  
Magetan Tahun 2013).  
(artikel).

Surabakti, Ramlan. (-). Memahami Ilmu  
Politik. Jakarta: Grafindo.

Wahid, Bustamin. 2018. *Esai-Esai Kuasa:  
Diskursus Politik Lokal*.  
Yogyakarta: Tanah Air Beta.

Salinan Peraturan Komisi Pemilihan  
Umum Republik Indonesia No 6 tahun  
2016

Salinan Undang-Undang Pemilihan Umum  
Republik Indonesia No 3 tahun 2016